



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

RADAR BANJARMASIN



Selasa

9 Maret 2025

Tanpa Pendidikan Berkualitas, Generasi Emas Tidak

PENDIDIKAN yang baik dan berkualitas adalah kunci untuk menciptakan generasi yang unggul, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Tanpa pendidikan yang memadai, sulit untuk menghasilkan individu atau kelompok yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai kemajuan dalam berbagai bidang.

Pendidikan yang buruk atau tidak merata dapat menghambat potensi generasi muda, yang pada akhirnya akan menghalangi tercapainya cita-cita membangun generasi emas yang unggul dan kompetitif.

Pendidikan adalah kawah candu di muka bagi peradaban sebuah bangsa. Tidak ada negara maju yang memondokkan pendidikan bagi masyarakatnya. Pendidikan dan juga kesehatan adalah pondasi sebuah bangsa untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan dapat bersaing di masa depan.

Pendidikan adalah sesuatu hal yang fundamental bagi masa depan generasi muda. Mencerahkan kehidupan bangsa jokus tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan cita-cita luhur untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, anggaran pendidikan Indonesia tahun 2025 yang semula direncanakan sebesar Rp7.272 triliun dari total APBN Rp3.621 triliun mengalami pemangkasan. Dengan alasan efisiensi, Kemendiknas Pendidikan Dasar dan Menengah mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp7.272 triliun, sementara Kemendiknas Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terkena pemotongan sebesar Rp56.607 triliun.

Kebijakan ini secara jelas bertentangan dengan konstitusi dan merusak tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 seperti yang

pendidikan di Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), negara diwajibkan mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan. Namun, kebijakan mandatory spending yang diterapkan Presiden Prabowo justru semakin menjauhkan anggaran pendidikan dari batas minimal tersebut.

SKOR PISA Indonesia Peringkat 6 di ASEAN Programme for International Student Assessment (PISA) atau Program Penilaian Siswa Internasional adalah evaluasi yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa di bidang matematika, sains, dan literasi dalam skala global. Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2000, PISA telah berlangsung dalam 8 siklus dan diadakan setiap tiga tahun sekali. Hasil PISA 2022 berasal dari siklus ke-8 penilaian ini, yang semula dijadwalkan pada 2021, namun tertunda satu tahun akibat pandemi.

Pengumpulan data PISA akan kembali dilakukan pada tahun 2025 (tahun ini). Menurut National Center for Education Statistics (NCES), siklus ke-9 ini akan menjadi yang terakhir sebelum sistem evaluasi beralih ke jadwal setiap empat tahun sekali. Pada PISA 2025, diperkirakan akan ada beberapa pembaruan dalam metode penilaian.

Fokus utama tetap pada sains, disertai dengan penilaian baru terkait kemampuan bahasa asing. Selain itu, PISA 2025 juga akan mencakup pengukuran keterampilan siswa dalam mengelola pembelajaran mandiri melalui perangkat digital. Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 80 negara yang terdaftar dalam penilaian PISA 2022 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Singapura menempati peringkat pertama dengan skor 1.679, diikuti oleh China di posisi kedua dengan total 1.605 poin.



Oleh
SYAIFULLAH *)

sama, Taiwan unggul dalam bidang matematika, sedangkan Jepang mendominasi dua bidang lainnya. Di peringkat kelima, Korea Selatan melengkapi dominasi negara-negara Asia dalam hasil penilaian PISA 2022.

Serupa dengan peringkat global, posisi Indonesia di antara negara-negara ASEAN masih berada di level menengah ke bawah. Singapura memimpin dengan skor tertinggi (1.679), jauh mengungguli negara lain. Vietnam menempati posisi kedua dengan 1.403 poin, diikuti oleh Brunet (1.317) dan Malaysia (1.213).

Indonesia sendiri berada di peringkat keenam dengan skor 1.108, tertinggal dari Thailand yang mencatatkan 1.182 poin. Sementara itu, dua negara dengan skor di bawah Indonesia adalah Filipina (1.058) dan Kamboja (1.012). Hasil ini mencerminkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan di berbagai aspek.

Skor PISA di atas ini—baru satu variabel untuk mengukur kualitas pendidikan kita, di tingkatan negara ASEAN saja kita kalah jauh dengan negara tetangga, alih-alih negara maju di belahan bumi lainnya. Oleh karena itu, mestinya anggaran pendidikan mesti tetan jadi

lah contoh negara yang menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam membangun kembali bangsanya pasca-Perang Dunia II. Saat Hiroshima dan Nagasaki dibom atom dalam Perang Dunia II, Kaisar Jepang ke-142, Hirohito, mengucapkan kata-kata pertamanya: "Berapa jumlah guru yang tersisa?"

Ia kemudian menambahkan bahwa Jepang tidak akan mampu mengejar Amerika jika tidak belajar. Oleh karena itu, ia mengimbau para jendralnya untuk mengumpulkan seluruh guru yang tersisa di pelosok Jepang.

Menurutnya, rakyat Jepang kini harus bertumpu pada para guru, bukan pada kekuatan pasukan. Kaisar Hirohito kemudian bergerak mengumpulkan sekitar 45.000 guru yang masih ada saat itu dan memberikan mereka arahan. Keberadaan guru menjadi krusial bagi seluruh lapisan masyarakat Jepang. Berkat peran mereka, negara ini perlahan mampu bangkit dari keterpurukan.

Senada dengan itu, pendidikan di Indonesia. Solusi untuk menciptakan generasi emas melalui pendidikan berkualitas tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat penting untuk mencapainya. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung pendidikan yang merata dan berkualitas, serta mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sektor pendidikan.

Masyarakat juga harus mendukung pendidikan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, seperti mendirikan lembaga pendidikan non-formal atau program pelatihan keterampilan bagi anak muda. Di sisi lain, dunia usaha memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Perusahaan dapat bekerjasama dengan institusi pendidikan untuk memberikan

mereka bisa mendapatkan. Kolaborasi memastikan bahwa keterampilan yang relevan dengan industri dan dunia kerja.

Di era digital ini, menjadi alat yang semakin meningkatkan kualitas Teknologi tidak hanya akses informasi, tetapi perkerja proses pembelajaran.

Penggunaan perangkat belajar interaktif, juga materi pembelajaran multimedia dapat meningkatkan kualitas belajar siswa dan membuat lebih menarik. Na teknologi harus dilak.

Tidak semua jenis pembelajaran yang bergantung teknologi juga bisa n sosial dan emosional itu, teknologi harus melengkapi proses pembelajaran yang berbasis teknologi.

Dengan langkah-langkah ini, kita dapat mewujudkan generasi emas yang unggul dan kompetitif, siap menghadapi tantangan masa depan.

*) Dosen FKIP Bahasa Indonesia Universitas Lambung Mangkurat



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

BANJARMASIN POST



Rektor Minta Doa Raih Akreditasi Unggul

● Asesmen Reakreditasi ULM Selesai

BANJARMASIN, BPOST

Tujuh asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah menyelesaikan asesmen lapangan reaktreditasi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) pada Sabtu (1/3).

Selama tiga hari proses asesmen, tim asesor melakukan evaluasi komprehensif, termasuk wawancara dengan pimpinan kampus, dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.

Selain itu, tim juga meninjau sarana dan prasarana, memverifikasi dokumen akademik, serta menilai sistem penjaminan mutu internal.

Menanggapi asesmen ini, Rektor ULM, Prof Ahmad, meminta doa dari masyarakat Kalimantan Selatan agar kampusnya kembali meraih status akreditasi "Unggul".

"Mohon doa agar akreditasi ULM bisa mencapai harkat akreditasi terbaik,"



HUMAS ULM UNTUK BPOST

ASESMEN LAPANGAN - Tim asesor BAN-PT melakukan asesmen lapangan reaktreditasi di kampus Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, pada 27 Februari - 1 Maret 2025.

ujarnya pada Senin (3/3).

Ia menambahkan, hasil akhir akreditasi diperkirakan keluar dalam dua pekan setelah asesmen. "Kita berharap bulan Maret ini sudah ada hasilnya," tambah Rektor Ahmad.

Sebelumnya, akreditasi ULM mengalami penurunan

akibat temuan pelanggaran dalam pengajuan guru besar.

Surat Nomor 1582/BAN-PT/LL/2024 tertanggal 20 September 2024, BAN-PT menetapkan penurunan akreditasi ULM.

Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor

1972/SK/BAN-PT/MONEV/PT/X/2024, ULM diberi waktu hingga 19 November 2024 untuk mengajukan reaktreditasi.

Meski akreditasinya turun dari "Unggul" menjadi "Baik", ULM tetap diakui secara internasional. Kampus ini masih menjadi universitas terbaik di Kalimantan Selatan versi EduRank 2024.

Dalam pemeringkatan nasional, ULM menempati peringkat ke-31, peringkat ke-2.196 secara global, serta masuk dalam TOP 50% pada 45 topik penelitian.

EduRank mencatat ULM memiliki 11.614 publikasi akademis dan 10.274 kutipan, serta dampak dari dua alumni terkemuka. ULM juga menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Kalsel yang masuk 80 besar universitas terbaik versi EduRank 2024. (msr)



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- **Berita Lainnya**
- Opini Dosen/Mahasiswa

BANJARMASIN POST



Polisi Temukan Celurit dan Busur

● Jaring 21 Remaja Diduga
Hendak Tawuran

BANJARMASIN, BPOST

Jajaran Polsek Banjarmasin Selatan mengamankan 21 remaja yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di Gang Gandapura, Jalan Tembus Mantuil, pada Senin (3/3) dini hari.

Dalam patroli yang berlangsung sejak pukul 01.00 hingga 05.00 Wita, polisi juga mengamankan delapan unit sepeda motor serta sejumlah senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi.

"Saat kami lakukan patroli cipta kondisi, kami mendapati sekelompok anak muda berkumpul di lokasi yang dikenal sebagai titik rawan tawuran," kata Kanitreskrim Polsek

Banjarmasin Selatan, Aptu Sudirno, Senin siang.

Setelah diperiksa, kepolisian menemukan senjata tajam jenis celurit serta busur dengan tiga anak panah di sekitar TKP.

Meski begitu, tak satu pun dari para remaja tersebut mengakui kepemilikan barang bukti tersebut.

Selain mengamankan para remaja, polisi juga menyita delapan unit sepeda motor yang digunakan mereka.

Para remaja yang diamankan langsung dibawa ke Polsek Banjarmasin Selatan untuk diberikan pembinaan. Polisi kemu-

● Hal 11 hal 1-3

Polisi Temukan...

● Sambungan Hal 9

dian memanggil orangtua mereka dan menberlakukan wajib lapor setiap hari dengan didampingi oleh orangtua masing-masing.

"Kami mengimbau kepada para orangtua agar lebih mengawasi anak-anaknya, terutama selama libur sekolah dan Bulan Ramadan ini. Jangan biarkan mereka keluar rumah tanpa pengawasan, apalagi berkumpul di tempat rawan pada dini hari," tegas Sudirno.

Polsek Banjarmasin Selatan memastikan akan terus meningkatkan patroli untuk mencegah aksi tawuran, ba-

lap liar, dan kejahatan jalanan lainnya demi menjaga kesamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya.

Maraknya aksi gangster dan tawuran di Banjarmasin belakangan ini menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk para akademisi dan pengamat hukum.

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sekaligus Komisiner KPID Kalsel Bidang PKSP, Daddy Fahmanadie, menilai bahwa fenomena ini perlu segera ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, komunitas, serta keluarga.

"Kepolisian harus bertindak tegas terhadap para pelaku, terutama jika melibatkan

anak di bawah umur. Efek jera harus diberikan agar kejadian serupa tidak berulang," ujarnya, Senin (3/3).

Menurut Daddy, ada beberapa langkah hukum yang bisa diterapkan untuk menekan aksi gangster di Banjarmasin, di antaranya seperti penindakan tegas. "Polisi harus mengambil langkah tegas sesuai hukum yang berlaku bagi pelaku yang terlibat dalam aksi gangster," katanya.

Kemudian, pengawasan melalui Bimas dan Sabhara dengan peningkatan patroli di daerah rawan serta sosialisasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap kegiatan kelompok gangster. (sul)

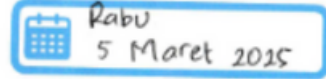


Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- **Berita Lainnya**
- Opini Dosen/Mahasiswa

RADAR BANJARMASIN



Optimis Hasil Visitasi Memuaskan

Kami telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas selama proses asesmen. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan kontribusi sosial demi meraih akreditasi yang unggul."

PROF AHMAD ALIM BACHRI
Rektor ULM

Tim Asesor Evaluasi Akreditasi ULM

BANJARMASIN – Tim asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sudah selesai melakukan visitasi di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), pada 1 Maret tadi. Hasilnya menunggu

majelis akreditasi bersidang. Usai visitasi itu, ULM optimis akreditasi yang turun dua level menjadi Baik, akan kembali berstatus Unggul. "Tentu saja kami optimis, karena dari dokumen yang kami kirimkan, serta saat visitasi sangat sesuai dan memuaskan," yakin Wakil Rektor ULM Bidang Akademik, Iwan Alfian. Sesi (4/3). ■

► *Race Optimis... Hal 5*

Tujuh Asesor Didatangkan

■ OPTIMIS...

Sambungan Hal 1

Penilaian akreditasi institusi ini untuk memastikan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi. Ada sebanyak tujuh asesor ahli dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terkemuka di Indonesia. Mereka secara langsung mengevaluasi aspek akademik, tata kelola, sarana-prasarana, serta pengabdian masyarakat ULM.

Dijelaskan Iwan, proses ini melibatkan tinjauan dokumen, observasi fasilitas, dan wawancara dengan civitas akademika guna memperoleh data komprehensif sebagai dasar penilaian akreditasi. "Semuanya sudah dilakukan, kami tinggal menunggu. Semoga dalam waktu dekat akan keluar, dengan hasil akreditasi Unggul," ucapnya.

Tujuh asesor yang didatangkan BAN-PT ke ULM adalah Mulyono Baskoro

dari Institut Pertanian Bogor, Mursalin dari Universitas Hasanuddin, Sarwiji Suwandi dari Universitas Sebelas Maret, Indratno dari Institut Teknologi Bandung, Selain itu Dewi Susanna dari Universitas Indonesia, Iwan Permadi dari Universitas Brawijaya, dan Andi Sularso dari Universitas Jember.

Proses akreditasi institusi mencakup penilaian terhadap sembilan kriteria utama. Mulai dari visi-misi, tata kelola, hingga luaran penelitian dan pengabdian masyarakat. "Hasil akreditasi ini tidak hanya menjadi tolok ukur kredibilitas institusi, tetapi juga menjadi acuan pengembangan strategis ULM ke depan," terang Iwan.

Rektor ULM, Prof Ahmad Alim Bachri mengatakan kegiatan asesmen lapangan ini menjadi momentum bagi ULM untuk memamerkan capaian dan inovasi dalam tri dharma

perguruan tinggi. "Kami telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas selama proses asesmen. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan kontribusi sosial demi meraih akreditasi yang unggul," ujarnya.

Seperti diketahui, negara temuan pelanggaran dalam proses pengajuan guru besar, BAN-PT menurunkan akreditasi ULM dua level dari Unggul ke Baik. Melalui suratnya bernomor 1582/BAN-PT/LL/2024 tertanggal 20 September 2024 lalu, BAN-PT menyampaikan keputusan Dewan Eksekutif BAN-PT kepada Rektor ULM. Isi keputusannya, menurunkan peringkat akreditasi perguruan tinggi ULM dari terakreditasi dengan peringkat Unggul alias A menjadi terakreditasi dengan peringkat Baik alias C. (mot/gr/dye)



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

BANJARMASIN POST



Pakai Dana...

● Sambutan Hal 1

terhadap stabilitas kepemimpinan dan kinerja pemerintah daerah.

Mengenal ketersediaan anggaran, Bachruddin menilai pengalokasian dana PSU adalah hal yang realistis. Sebab, PSU merupakan amanat konstitusi yang harus diprioritaskan.

Jika APBD Kota Banjarbaru tidak mencukupi, pihak-pihak terkait dapat

merundingkan solusi terbaik tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. "Program lain yang bisa ditunda harus dilakukan, agar dananya bisa dialihkan untuk PSU," jelasnya.

Ia juga menyoroti dampak dari ketidakpastian anggaran terhadap legitimasi PSU. Menurutnya, jika PSU tetap bisa berjalan dengan baik meskipun anggarannya belum pasti, maka hal itu bisa sedikit meningkatkan legitimasi pemilu.

Sebaliknya, meskipun anggaran sudah tersedia, namun PSU tidak dijalankan de-

ngan baik, maka hal itu justru akan semakin menurunkan kredibilitas KPU.

Lebih lanjut, ia menegaskan semua pihak yang berkepentingan harus berkoordinasi dan bekerja maksimal demi suksesnya PSU.

Ia juga berpandangan, persoalan ini seharusnya dapat diselesaikan di tingkat daerah tanpa harus melibatkan pusat. "Menurut saya, terlalu kecil masalah ini harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Kalau sampai itu terjadi, cukup memprihatinkan," pungkasnya. (mar)



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

RADAR BANJARMASIN



Jumat

7 Maret 2025

Oplosan Bensin vs Praktiknya pada Masa Rasulullah SAW

BELAKANGAN ini, marak pemberitaan tentang dugaan praktik oplosan bensin yang merugikan banyak pihak. Tidak hanya merugikan konsumen yang mengeluarkan uang untuk kualitas bahan bakar yang seharusnya layak, tetapi juga bisa berdampak pada lingkungan dan keselamatan berkendara. Oplosan bensin adalah tindakan mencampur bahan bakar dengan zat lain untuk mendapatkan keuntungan lebih, meskipun kualitasnya tidak sesuai lagi. Pada konteks hukum positif, tindakan ini jelas masuk dalam kategori kecurangan dan penipuan. Namun, jika kita melihat dari perspektif sejarah, bagaimana Islam memandang praktik semacam ini? Apakah pada masa Rasulullah SAW terdapat praktik serupa?

Dalam sejarah Islam, kecurangan dalam perdagangan bukanlah hal baru. Salah satu bentuk kecurangan yang sering ditemukan pada masa Rasulullah SAW adalah praktik ghisyy, yaitu menyembunyikan cacat barang atau mencampur barang berkualitas baik dengan yang buruk tanpa memberi tahu pembeli. Praktik ini dilarang keras dalam Islam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golongan kami." Larangan ini mencerminkan prinsip kejujuran dan transparansi dalam perdagangan, yang jika diterapkan dalam konteks modern, jelas mencakup pelarangan terhadap oplosan bensin.

SAW menemukan seorang pedagang yang menjual gandum di pasar. Dari luar, gandum itu terlihat berkualitas baik, tetapi setelah Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum tersebut, ternyata bagian dalamnya basah. Ketika ditanya, pedagang itu beralasan bahwa gandum tersebut terkena hujan. Rasulullah SAW pun menegur, "Mengapa engkau tidak letakkan yang basah di atas agar orang-orang bisa melihatnya?" Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam, transparansi adalah prinsip utama dalam jual beli. Jika seorang pedagang harus jujur dalam menjual gandum, maka seharusnya prinsip yang sama juga berlaku dalam perdagangan bahan bakar.

Dalam konteks dugaan oplosan bensin, jelas bahwa tindakan mencampur bahan bakar dengan zat lain tanpa sepengetahuan pembeli adalah bentuk ghisyy modern. Konsumen membeli bensin dengan harapan mendapatkan kualitas yang sesuai dengan standar, tetapi mereka malah menerima bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi. Sama seperti pedagang gandum yang menyembunyikan cacat dagangannya, para pelaku oplosan bensin juga menyembunyikan fakta bahwa bensin yang mereka jual telah dicampur dengan zat lain. Meskipun Pertamina menyebutnya sebagai proses blending dan bukan oplosan, namun tetap saja ini menyembunyikan fakta dari konsumen. Jika informasi mengenai

Oleh
SRI MAULIDA *)

dirugikan dan ini melanggar prinsip kejujuran dalam Islam.

Selain dari sudut pandang kejujuran dalam jual beli, oplosan bensin juga bisa dikategorikan sebagai bentuk kezaliman. Dalam Islam, kezaliman terhadap orang lain dikedam keras. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Takutlah kepada kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat." (HR. Muslim). Menjual bahan bakar oplosan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat. Kendaraan yang rusak akibat bensin oplosan bisa menimbulkan kecelakaan, kerusakan mesin, hingga meningkatkan pencemaran udara. Dalam jangka panjang, praktik ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan yang seharusnya berjalan dengan jujur dan adil.

Tentu saja, ada pihak yang membela praktik oplosan bensin dengan alasan ekonomi. Mereka berargumentasi bahwa harga bahan bakar semakin mahal, sementara keuntungan dari bisnis bahan bakar tidak cukup untuk menutupi biaya operasional. Namun, Islam tidak pernah membenarkan tindakan haram hanya karena alasan ekonomi. Sebagai contoh, Islam melarang riba, meskipun dalam praktiknya riba bisa memberikan keuntungan finansial yang besar bagi

yang diperoleh dari praktik ini tidak dapat menghalalkan tindakan yang merugikan banyak orang.

Pada sistem ekonomi Islam, perdagangan harus didasarkan pada prinsip al-amanah (kepercayaan) dan al-adl (keadilan). Islam mendorong para pedagang untuk mencari keuntungan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sukses karena beliau selalu mengedepankan kejujuran dalam bertransaksi. Hal ini seharusnya menjadi teladan bagi pelaku usaha di era modern, termasuk mereka yang bergerak di sektor energi dan bahan bakar.

Lalu, bagaimana cara mencegah praktik oplosan bensin agar tidak semakin marak? Dalam Islam, ada konsep hisbah, yaitu pengawasan dalam transaksi agar tidak terjadi kecurangan. Pada masa Rasulullah SAW, pasar diawasi oleh petugas khusus yang memastikan setiap transaksi berjalan dengan adil. Jika ditemukan pedagang yang curang, mereka akan diberi peringatan atau dikenai sanksi. Konsep hisbah ini bisa diterapkan dalam pengawasan bahan bakar dengan memperkuat regulasi dan meningkatkan transparansi dalam distribusi bensin. Pemerintah, sebagai pemegang otoritas, memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari kecurangan semacam ini.

Selain pengawasan dari pemerintah,

Kesadaran konsumen harus dikan agar mereka lebih selektif membeli bahan bakar. Jika ada indikasi kecurangan, masyarakat harus berani melaporkan kepada berwenang. Dalam Islam, melapor keadilan adalah kewajiban individu sesuai dengan kapasitas sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa di antara melihat kemungkaran, hendilah mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga dengan hatinya, dan itu adalah mah-lemahnya iman." (HR. Muslim).

Oplosan bensin adalah praktik yang tidak boleh dianggap ringan. Dari perspektif Islam, praktik ini adalah bentuk penipuan dan kezaliman yang jelas dilarang. Jika pada masa Rasulullah SAW kecurangan dalam perdagangan ditegur langsung, maka sudah seharusnya kita yang hidup di zaman modern ini juga lebih tegas dalam memberantas praktik semacam ini. Kejujuran dalam bisnis bukan hanya masalah moral, tetapi juga merupakan fondasi dari perekonomian yang berkelanjutan. Jika ingin Indonesia maju dan masyarakatnya sejahtera, maka praktik-praktik curang seperti oplosan bensin harus segera diberantas dengan ketegasan hukum dan nilai-nilai moral dari semua pihak. (*)

salah contoh konkret dari larangan ghisyy terjadi ketika Rasulullah

pencampuran tidak diungkapkan secara transparan, maka konsumen tetap

pihak tertentu. Begitu pula dengan oplosan bensin, keuntungan finansial

masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah oplosan bensin.

Komisiariat ULM



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

BANJARMASIN POST

Jumat
7 Maret 2025



Aktif Berkegiatan...

● Sumbangan Hal 9

oleh Dinda Syarif Juni Rachmatika, mahasiswi semester 4 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Tak hanya berprestasi di dunia akademik, Dinda juga aktif dalam berbagai organisasi, baik di dalam maupun di luar kampus. Salah satu pencapaiannya adalah menjadi pemenang lomba debat dalam ajang Bawasku Kalsel Youth Fest 2024.

Di kampus, Dinda aktif di Lembaga Pengkajian dan Penalaran Demokrasi Hukum (LP2DH) FH ULM. Sementara di luar kampus, ia sempat bergabung dengan Pemuda Bakti Banua, organisasi relawan

di bawah Yayasan Hasnur Center yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan.

Selama satu tahun, ia terlibat dalam program Muda Mengajar, mengunjungi berbagai desa binaan Hasnur Group di Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Tapin, Rantau untuk mengajar anak-anak setiap minggu.

Selain itu, ia juga turut serta dalam program kemanusiaan Ramadan, seperti pembagian sembako untuk warga desa.

"Yang paling berkesan adalah saat bisa mengajar anak-anak di desa yang belum pernah aku kunjungi. Meskipun latar belakang pendidikanku di hukum, pengalaman berbagi ilmu dengan mereka sangat ber-

harga," ujarnya.

Di tengah kesibukannya, Dinda tetap meluangkan waktu untuk menulis diary atau journaling sebagai cara mencurahkan pikiran dan pengalaman.

"Aku tertarik menulis blog atau artikel, tapi sejauh ini masih sebatas jurnal pribadi," katanya.

Selain itu, ia juga senang memasak, terutama mencoba resep baru untuk menghilangkan kejenuhan.

Dengan segudang aktivitasnya, Dinda adalah contoh anak muda yang tak hanya berprestasi di akademik, tetapi juga peduli terhadap pendidikan dan sosial. Ia membuktikan bahwa kesibukan bukan penghalang untuk berkembang dan berbagi manfaat bagi orang lain. (msr)



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

BANJARMASIN POST



Dualisme Kewenangan Jaksa dan Polisi

DALAM pengadilan pidana, hukum acara sebagai hukum formal yang digunakan untuk mengadkan hukum materiil merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa proses pengadilan hukum pidana berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku demi menciptakan adanya kepastian hukum. Sistem pengadilan hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia melibatkan beberapa institusi yaitu Kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Jaksa dan polisi memiliki peran yang berbeda dalam tahap penuntutan dan pengadilan dalam tahap persidangan. Selain itu, terdapat lembaga penyalakan sebagai tempat bagi jaksa jika terdapat pelanggaran tindak pidana. Setiap institusi tersebut telah diberikan kewenangan yang seharusnya tidak saling bertentangan atau menimbulkan dualisme.

Jika melihat rancangan undang-undang hukum acara pidana (RUU KUHPA), terdapat beberapa ketentuan yang berpotensi menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan Jaksa. Pasal 12 ayat 11 RUU KUHPA mengatur bahwa jika penyidik dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah

terakhir dengan mengubah UU yang mengatur lembaga ini sesuai dengan mekanisme yang tidak sesuai mengubah UU 1945.

Namun, jika dilakukan dengan kedudukan Kepolisian dan Kejaksaan, setidaknya Kejaksaan menurutnya disebut dalam UU 1945 bukan berarti mengadkan kedudukannya lebih tinggi dari Kejaksaan. Hal ini karena secara teoritis diatur atau tidaknya suatu lembaga negara dalam UU 1945 tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan dapat konstitusional suatu lembaga negara. Oleh karena itu sebenarnya, Kepolisian dan Kejaksaan sama-sama lembaga negara yang berkedudukan penting khususnya dalam konteks penegakan hukum.

Kejaksaan secara tegas disebutkan dalam UU 1945 karena itu menunjukkan bahwa lembaga tersebut dibutuhkan dalam struktur ketatanegaraan. Sementara itu, Kejaksaan juga memiliki sifat "konstitusional implikasi" yang berarti memiliki derajat yang sama pentingnya dengan lembaga lainnya yang eksplisit disebutkan dalam UU 1945.

Hal inilah yang ditegaskan MK melalui

serta tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Dengan adanya diferensiasi yang jelas maka institusi penegakan hukum pidana diharapkan mampu menciptakan akibat-akibat masing-masing lembaga dan memperkuat prinsip keadilan serta transparansi dalam sistem peradilan pidana.

Perayaan yang kemudian muncul adalah apakah pemertan prinsip diferensiasi fungsional secara mutlak dapat diterapkan ke seluruh jenis tindak pidana? Terhadap hal tersebut, MK sebenarnya telah memberikan jalan keluar. MK menegaskan bahwa pemberian kewenangan melakukan penyidikan kepada lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan sebenarnya diperbolehkan.

Ada beberapa hal yang menjadi ukuran pemberian kewenangan penyidikan tersebut. Pertama, upaya penegakan hukum yang terdapat dalam undang-undang tersebut diatur secara jelas dan tegas, termasuk di dalamnya dilakukan secara terkoordinasi antaraparat penegak hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan. Kedua, kewenangan tersebut harus



Oleh:
Muhammad Erfa Redhani
Dosen Fakultas
Hukum Universitas
Lambung Mangkurat

per atau pengad dapat diserahkan kepada pemerintah untuk melakukan pemeriksaan dan penuntutan.

Selain itu, terdapat ketentuan Pasal 111 ayat 12 yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk memperkirakan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian. Padahal, Kepolisian dan Kejaksaan merupakan institusi dalam sistem peradilan pidana formal justice system yang tidak boleh saling menyalahi kewenangan.

Kedudukan Kepolisian dan Kejaksaan
Jika dilihat dari letak hukumnya di dalam UU 1945, secara normatif Kepolisian disebut sebagai organ ke-1. Pasal 30 ayat 14 UU 1945 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayahi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Sementara itu, teks UU 1945 tidak menentukan secara eksplisit kedudukan Kejaksaan. Menurut beberapa penemuan, apakah Kejaksaan kedudukannya lebih penting dari Kepolisian?

Dalam hukum tata negara, klasifikasi lembaga negara salah satunya dapat dilihat melalui dasar hukum yang diberikannya. Lembaga negara yang diberikan dasar hukum yang lebih kuat. Hal ini karena untuk mengubah atau meniadakannya lebih sulit. Sementara lembaga negara yang diberikan berdasarkan UU, posisi hukumnya lebih mudah untuk diubah karena

merupakan satu-satunya penyidik atau penyidik tunggal. Menurut MK, kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UU 1945 tetapi dari undang-undang. Sementara itu, kewenangan Kejaksaan berdasar pada UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Berdasarkan peradilan tersebut, secara keseluruhan Kepolisian dan Kejaksaan merupakan institusi negara yang memiliki peranan penting dalam penegakan hukum.

Namun terlepas dari kedudukan Kepolisian dan Kejaksaan dalam aspek hukum tata negara, hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana seharusnya kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan? Apakah menurut hukum tata negara, kedua lembaga tersebut diperbolehkan untuk memiliki kewenangan yang berpotensi saling tumpang tindih?

Diferensiasi Fungsional
Diferensiasi fungsional adalah pembagian kekuasaan dengan pembagian tugas dan wewenang di antara jabatan aparat penegak hukum secara insitutional. Perbedaan kekuasaan dengan prinsip tersebut muncul pada pembagian tugas (task division) MK dalam Putusan Nomor 28/PUU-V/2007 yang kemudian diperkuat melalui Putusan Nomor 28/PUU-V/2023. Melalui dua putusan tersebut MK menegaskan bahwa penerapan asas diferensiasi fungsional tersebut merupakan cara agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sehingga menciptakan mekanisme saling mengawasi antara aparat penegak hukum,

bagian terkait pada atau tidak tidak pidana tersebut. MK menegaskan bahwa jika Kejaksaan ditetapkan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, maka Kepolisian tidak berwenang. Sebaliknya, jika Kepolisian yang diberi wewenang penyidikan, maka Kejaksaan tidak boleh melakukan pemeriksaan.

Oleh karena itu, penyusunan RUU KUHPA seharusnya memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, penetapan prinsip diferensiasi fungsional adalah hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum pidana. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan efisien. Kedua, sebagai tindak lanjut dari putusan MK, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat prinsip diferensiasi fungsional ini dengan cara memperkuat peran masing-masing lembaga penegak hukum yang berkecukupan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum pidana.

Adapun tindak pidana umum sebagaimana yang diatur dalam KUHP tidak dapat dilepas, sehingga kewenangan penyidikan tidak menjadi kewenangan Kepolisian.

Pemberian kewenangan kepada jaksa dalam RUU KUHPA untuk mengambil alih fungsi penyidikan merupakan pengaturan yang tidak hanya berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, bertentangan dengan prinsip diferensiasi fungsional dan tidak sejalan dengan prinsip sistem peradilan pidana terpadu. Melainkan juga secara jelas bertentangan dengan putusan MK yang merupakan tafsir dari UU 1945.

Pemberian kewenangan kepada jaksa dalam RUU KUHPA untuk mengambil alih fungsi penyidikan merupakan pengaturan yang tidak hanya berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, bertentangan dengan prinsip diferensiasi fungsional dan tidak sejalan dengan prinsip sistem peradilan pidana terpadu. Melainkan juga secara jelas bertentangan dengan putusan MK yang merupakan tafsir dari UU 1945.



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- **Berita Lainnya**
- Opini Dosen/Mahasiswa

BANJARMASIN POST

Kabu
12 Maret 2025

PLN Ajak Mahasiswa Teknik ULM Dalam Ketahanan Energi



PLN UID KALSALTENG

KULIAH UMUM - Manager PLN UID Kalselteng, Ahmad Syaiki memberikan kuliah umum kepada sekitar 100 mahasiswa Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Mesin.

BANJARBARU, BPOST - Dalam rangka program GM Mengajar, General Manager PLN UID Kalselteng, Ahmad Syaiki, mengisi kuliah tamu di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru. Kegiatan bertema "Ketahanan Energi dan Energi Baru Terbarukan" ini diikuti oleh sekitar 100 mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro dan Teknik Mesin, Selasa (11/3).

Wakil Dekan I Fakultas Teknik ULM, Dr Ir Mahmud ST MT mengapresiasi kehadiran GM PLN dalam kuliah tamu ini.

"Terima kasih, di sela kesibukannya, beliau berbagi pengetahuan praktis yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Kehadiran praktisi industri seperti PLN sangat penting untuk menambah wawasan mahasiswa," ujarnya.

Kuliah tamu ini merupakan bentuk sinergi antara PLN dan dunia akademik dalam mewujudkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan industri energi masa depan. Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Energi

● HATI KOL 4-7

PLN Ajak...

● Sambungan Hal 9

Baru Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

"PLN adalah salah satu perusahaan yang paling aktif dalam pemanfaatan EBT di Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan yang disampaikan langsung oleh praktisi menjadi sangat relevan. Kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut di kesem-

patan mendatang, sehingga semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan wawasan langsung dari para praktisi industri," harap Mahmud.

Dalam pemaparannya, Ahmad Syaiki menjelaskan peran PLN dalam menghadapi perubahan iklim global dan mendorong transisi energi.

"PLN ditugaskan pemerintah untuk memimpin transisi energi. Salah satu upaya nyata PLN dalam pengurangan emisi gas karbon adalah meningkatkan penggunaan EBT di Indonesia,"

jelasnya.

PLN berkomitmen meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebesar 75 persen dari tambahan 100 GW pembangkit listrik hingga 2040.

"Kalimantan memiliki potensi EBT yang kaya, seperti biogas, biomassa, tenaga surya, dan angin, yang dapat dimanfaatkan secara optimal," paparnya.

Selain itu, PLN juga aktif mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai melalui pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum

(SPKLU).

"Saat ini, PLN telah menyediakan 75 SPKLU di Kalselteng, dengan rata-rata jarak antar SPKLU sekitar 42 km, yang semakin memudahkan pengguna kendaraan listrik dalam melakukan perjalanan jarak jauh," tambahnya.

Sementara itu, Senior Manager Perencanaan PLN UID Kalselteng, Diah Puspita yang turut menjadi narasumber, menekankan bahwa pemanfaatan energi lokal menjadi salah satu strategi utama dalam menjaga ketahanan energi. (mel/)



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

RADAR BANJARMASIN

Rabu
12 Maret 2025

Ramadan Bersejarah di Banjar

TAHULAH pian, banyak peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Banjar di bulan Ramadan. Sejarawan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Mansyur mengatakan salah satu peristiwa bersejarah adalah meletusnya Perang Banjar pada 24 Ramadan 1275 H (28 April 1859). "Pangeran Antasari memimpin dalam serangan terhadap Benteng Oranje Nassau di Pengaron. Serangan ini menjadi tonggak awal perjuangan rakyat Banjar melawan kolonial Belanda," ungkapnya. ■

► Baca Ramadan... Hal 5

■ RAMADAN...

Sambungan Hal 1

Selain itu, pada 13 Ramadan 1278 H (14 Maret 1862), Pangeran Antasari diangkat sebagai pemimpin tertinggi rakyat Banjar dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. "Pengangkatan ini menunjukkan bagaimana Ramadan menjadi momentum strategis bagi rakyat Banjar untuk memperkuat perjuangan mereka," beber Mansyur.

Namun, tidak semua

peristiwa yang terjadi di masa itu berakhir manis. Seperti perjanjian antara Kesultanan Banjar dan Pemerintah Hindia Belanda yang ditandatangani pada 26 Ramadan 1241 H (4 Mei 1826). Perjanjian ini membuat Kesultanan Banjar kehilangan kedaulatan luar negerinya, dan menjadi negeri pinjaman di bawah kekuasaan Belanda.

Meskipun sejarah mencatat berbagai suka dan duka, Mansyur menekankan bahwa Ramadan selalu menjadi bulan penuh semangat juang. "Semangat

jiyah di bulan Ramadan ini harus dimaknai dalam konteks yang lebih luas, seperti jiyah melawan hawa nafsu, jiyah dalam pendidikan, dan untuk kesejahteraan sosial," tuturnya.

Menurutnya, Ramadan bukanlah bulan yang identik dengan kemalasan atau menurunnya produktivitas. "Justru dalam sejarah Islam juga banyak peristiwa besar terjadi di bulan ini, seperti Perang Badar, Fathu Makkah, hingga berbagai pertempuran penting dalam sejarah umat Islam," bandingnya. (lan/gr/dye)



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

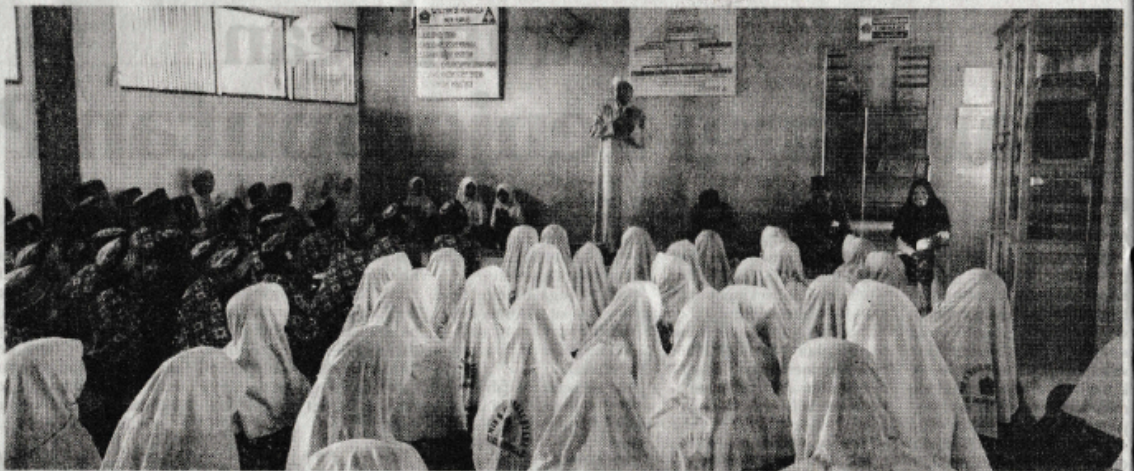
- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

Model Interaksi Sosial Masyarakat Banjar dalam Membangun Suasana Belajar yang Inklusif di Sekolah

TERAKSI sosial masyarakat Banjar mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh sejarah panjang yang dimulai sejak masa kerajaan Banjar pada era kemerdekaan Indonesia.

Pada masa kerajaan Banjar, interaksi sosial di Banjarmasin sangat dipengaruhi oleh perdagangan, baik antar kerajaan lokal maupun dengan pedagang dari luar negeri, seperti Tiongkok, Arab, dan Eropa. Kehadiran Islam yang dibawa oleh para pedagang turut membentuk norma sosial masyarakat Banjar pada waktu itu.

Selama masa kolonial Belanda, interaksi sosial masyarakat Banjarmasin dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang memisahkan berbagai golongan, seperti Eropa, pribumi, dan lain-lain, yang menimbulkan ketimpangan sosial. Sistem kerja paksa yang diberlakukan oleh Belanda semakin memperburuk ketimpangan ini, dan hanya kelompok elit pribumi yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan formal yang mulai terlibat dalam politik. Setelah Indonesia merdeka, interaksi sosial di Banjar mulai berubah dengan adanya pembauran antar etnis dan suku yang lebih terbuka, serta pengaruh dari budaya lain di Indonesia, seperti Jawa dan Bali. Masyarakat Banjar yang mayoritas beragama Islam, dengan keberagaman etnis seperti Banjar, Bugis, Jawa, Tionghoa, tetap menjaga kerukunan antar kelompok, meskipun tantangan untuk identitas sering kali muncul.



Lebih mendalam, dengan banyaknya aktivitas yang berhubungan dengan sungai, seperti penggunaan perahu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang kesenian, Banjar kaya dengan musik tradisional seperti Gamelan Banjar dan Sambung Ayat, yang memiliki kaitan erat dengan budaya Islam. Seni pertunjukan lainnya, seperti Pantun Banjar dan Tari Banjar, juga menjadi bagian penting dari



tanpa kehilangan identitas asli.

Kemudian, adanya perbedaan tingkat akses terhadap teknologi juga menjadi masalah, di mana sebagian orang mungkin merasa terpinggirkan atau kesulitan untuk ikut dalam percakapan sosial yang lebih luas. Tantangan-tantangan ini mengharuskan masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan solidaritas dengan cara beradaptasi secara bijak

elemen budaya, seperti pertukaran budaya, seni tradisional, atau diskusi tentang nilai-nilai lokal yang relevan dengan kehidupan modern.

Di samping itu, interaksi sosial yang terjadi di masyarakat Banjar sering melibatkan kegiatan sosial yang bersifat inklusif, seperti acara adat dan pertemuan komunitas. Hal ini bisa diterjemahkan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler di



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

Perkembangan media sosial turut mengubah pola interaksi masyarakat Banjar, yang semakin terbukanya pengaruh budaya luar, namun nilai-nilai tradisional dan gotong royong tetap menjadi bagian keharmonisan sosial di kota ini. Interaksi sosial masyarakat Banjarmasin, yang majemuk secara etnis dan agama, menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal tetap relevan di tengah perubahan yang terjadi akibat modernisasi dan globalisasi.

Masyarakat Banjar, yang terletak di Kalimantan Selatan, memiliki tradisi dan nilai budaya yang kaya, yang telah berkembang selama berabad-abad. Terbentuk oleh berbagai pengaruh, baik dari luar maupun dalam negeri, nilai-nilai adat istiadat di Banjar sangat bervariasi, dengan salah satu yang terkenal adalah Upacara Maulid Nabi yang dilaksanakan setiap tahun dengan berbagai kegiatan seperti ziarah makam ulama, pembacaan syair, dan hiburan rakyat.

Kehidupan beragama di Masyarakat Banjar sangat kental, dengan mayoritas masyarakat memeluk agama Islam yang sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Tradisi keagamaan seperti Sholat berjamaah dan Ngaji menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Nilai-nilai kesederhanaan juga sangat dijunjung tinggi, tercermin dalam sikap mereka yang mengutamakan kerendahan hati, dan menonjolkan kemewahan.

Selain itu, gotong royong merupakan tradisi sosial yang sangat dijaga, di mana masyarakat saling bekerja sama dalam berbagai kegiatan, baik sosial maupun nasihat sehari-hari.

Masyarakat Banjar juga memiliki ikatan yang erat dengan alam, terutama sungai, yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Sungai Barito dan Sungai Martapura tidak hanya sebagai sarana transportasi dan perdagangan, tetapi juga memiliki nilai budaya yang

tradisional seperti Soto Banjar dan Ketupat Kandungan tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan kedekatan masyarakat dengan alam serta tradisi yang sudah berlangsung lama. Paksi adat, seperti Baju Kurung Banjar dan Baju Teluk Belanga, menggambarkan kesopanan dan kebanggaan yang dihargai dalam masyarakat Banjar. Pengaruh Islam yang kuat juga terlihat dalam seni Islam, seperti kaligrafi yang banyak ditemukan dalam dekorasi masjid dan rumah, serta dalam arsitektur masjid yang indah. Secara keseluruhan, tradisi dan nilai budaya masyarakat Banjarmasin mencerminkan kehidupan yang harmonis antara manusia, agama, dan alam, yang terus dilestarikan hingga saat ini.

Selain itu Masyarakat Banjar dikenal dengan sifat sosial yang ramah, terbuka, dan suka bergaul.

Interaksi sosial mereka terjalin dalam berbagai kegiatan, baik formal maupun informal, yang memfasilitasi terbangunnya hubungan antarindividu. Salah satu bentuk interaksi yang paling khas adalah melalui kegiatan sosial dan budaya, seperti pertemuan komunitas yang sering diadakan di ruang terbuka, baik di pasar tradisional maupun warung.

Kegiatan ini memungkinkan warga untuk saling berbincang, berbagi pengalaman, dan mempererat solidaritas. Selain itu, komunitas-komunitas lokal, mulai dari pecinta seni hingga wirasaha, juga menjadi tempat penting bagi masyarakat untuk bertemu dan saling berdiskusi, menciptakan ikatan sosial yang kuat. Pasar tradisional, seperti Pasar Terapung, juga memainkan peran penting dalam interaksi sosial, di mana pedagang dan pembeli tidak hanya bertransaksi tetapi juga berbagi cerita dan informasi, memperlihatkan keterbukaan dalam hubungan antarwarga.

Kehadiran media sosial semakin memperluas jangkauan interaksi, memungkinkan masyarakat untuk



Oleh
SIGIT TRIYONO*

bergaul dan bertukar informasi secara virtual. Di sektor pendidikan, sekolah dan universitas di Banjarmasin juga mengadakan acara yang terbuka untuk umum, mempertemukan berbagai lapisan masyarakat untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan.

Festival dan acara tahunan seperti Festival Kampung Sasirangan menjadi ajang besar bagi masyarakat untuk berkumpul dan bersosialisasi, sementara dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Banjar menunjukkan keramahan mereka dengan saling menyapa dan membangun hubungan yang akrab. Secara keseluruhan, masyarakat Banjar menciptakan ekosistem sosial yang dinamis dan inklusif, di mana interaksi antarindividu terjalin secara terbuka, membangun komunitas yang saling mendukung dan memperkaya satu sama lain.

Dalam era globalisasi, interaksi sosial di masyarakat Banjar, seperti di tempat lain, menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah dampak dari kemajuan teknologi dan informasi yang sangat cepat. Masyarakat kini terhubung dengan dunia luar melalui internet dan media sosial, yang meskipun membawa banyak manfaat, juga menciptakan jarak sosial. Hal ini bisa menyebabkan perubahan dalam cara orang berinteraksi, dimana komunikasi virtual lebih dominan daripada tatap muka langsung. Selain itu, globalisasi juga membawa masuk berbagai budaya dan nilai-nilai asing yang kadang bertentangan dengan tradisi lokal.

Masyarakat Banjar harus pintar dalam memilih dan memilih nilai-nilai yang dapat memperkaya budaya mereka

terhadap perubahan yang terjadi, sambil tetap menghargai dan mempertahankan nilai-nilai sosial yang telah lama ada.

Interaksi sosial pada masyarakat Banjar, yang dikenal dengan sifatnya yang ramah, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, memiliki potensi besar untuk dijadikan model dalam implementasi interaksi sosial di sekolah. Kehidupan sosial masyarakat Banjar yang berbasis pada gotong royong, saling membantu, dan menjaga hubungan baik antar individu dapat menjadi landasan bagi pengembangan model interaksi sosial yang positif di lingkungan pendidikan.

Dalam konteks sekolah, model interaksi sosial ini bisa diterapkan dengan membangun suasana yang mendukung komunikasi terbuka antara guru, siswa, dan orang tua. Misalnya, dalam kegiatan pembelajaran, guru bisa mengajak siswa untuk berdiskusi secara terbuka tentang berbagai topik, menghargai pendapat yang berbeda, dan saling berbagi pengetahuan. Selain itu, kegiatan gotong royong yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar, seperti bekerja sama dalam acara adat atau memperbaiki fasilitas umum, bisa diterjemahkan dalam bentuk proyek kelompok di sekolah, di mana siswa diajak untuk bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan kerja sama, tetapi juga mempererat hubungan antar siswa yang berasal dari latar belakang berbeda.

Selain itu, masyarakat Banjar yang terbuka terhadap pengaruh luar namun tetap menjaga identitas budaya dapat menjadi inspirasi untuk mengajarkan pentingnya toleransi dan saling menghargai di sekolah. Mengajarkan siswa untuk menerima keberagaman dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dalam membangun kebersamaan sangat penting. Dalam praktiknya, sekolah bisa mengadakan kegiatan yang melibatkan berbagai

aktivitas ekstrakurikuler di sekolah yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi lebih luas dengan sesama siswa dan guru, serta melibatkan orang tua dalam berbagai kegiatan. Sebagai contoh, mengadakan acara yang melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar, seperti bazar atau kegiatan sosial, bisa membantu membangun hubungan yang lebih kuat antara sekolah dan komunitas.

Secara keseluruhan, mengadopsi nilai-nilai interaksi sosial yang terkandung dalam budaya Banjar ke dalam kehidupan sekolah dapat memperkuat rasa kebersamaan, toleransi, dan saling menghargai. Ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, di mana siswa merasa diterima dan dihargai, serta mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, model interaksi sosial masyarakat Banjar tidak hanya relevan untuk kehidupan sosial di luar sekolah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif dalam pembentukan karakter dan kualitas hubungan sosial di lingkungan pendidikan.

Sebagai simpulan, penerapan model interaksi sosial masyarakat Banjar dalam lingkungan sekolah memiliki potensi besar untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif, harmonis, dan saling menghargai. Dengan menanamkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta keterbukaan terhadap keberagaman, sekolah dapat menjadi tempat yang tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter siswa yang toleran dan peka terhadap kebutuhan sosial. Melalui kegiatan yang melibatkan kerjasama, komunikasi terbuka, dan penghargaan terhadap budaya lokal, sekolah dapat memperkuat hubungan antar individu, baik antara siswa, guru, maupun masyarakat sekitar, sehingga nilai-nilai karakter yang terdapat pada masyarakat Banjar tidak tergeser oleh zaman dan generasi. (*/al/sbx)

* Dosen FKIP ULM Banjarmasin
Prodi: IPS (Ilmu Pendidikan Sosial)



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- **Berita Lainnya**
- Opini Dosen/Mahasiswa

RADAR BANJARMASIN



Kamis
13 Maret 2025



ANTUSIAS:
Salah satu mahasiswa mengajukan pertanyaan kepada GM PLN UID Kalselteng.

Berikan Materi Ketahanan Energi kepada Mahasiswa ULM

BANJARBARU – Dalam rangka program GM Mengajar, General Manager PLN UID Kalselteng, Ahmad Syauki mengisi kuliah tamu di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru. Kegiatan bertema "Ketahanan Energi dan Energi Baru Terbarukan" ini diikuti oleh sekitar 100 mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro dan Teknik Mesin.

Wakil Dekan I Fakultas Teknik ULM, Dr Ir Mahmud ST MT mengapresiasi kehadiran GM PLN dalam kuliah tamu ini. "Terima kasih, di sela kesibukannya, beliau berbagi pengetahuan praktis yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Kehadiran praktisi industri seperti PLN sangat penting untuk menambah wawasan mahasiswa," ujarnya.

Kuliah tamu ini merupakan bentuk sinergi antara PLN dan dunia akademik dalam mewujudkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan industri energi masa depan. Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari kebijakan



MENGAJAR: General Manager PLN UID Kalselteng, Ahmad Syauki mengisi kuliah tamu di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru.

pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. "PLN adalah salah satu perusahaan yang paling aktif dalam pemanfaatan EBT di Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan yang disampaikan langsung oleh praktisi menjadi sangat relevan. Kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut di kesempatan mendatang, sehingga semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan wawasan langsung dari para praktisi industri," harap Dr Ir

Mahmud ST MT.

Ahmad Syauki menjelaskan peran PLN dalam menghadapi perubahan iklim global dan mendorong transisi energi. "PLN ditugaskan pemerintah untuk memimpin transisi energi. Salah satu upaya nyata PLN dalam pengurangan emisi gas karbon adalah meningkatkan penggunaan EBT di Indonesia," jelasnya.

PLN berkomitmen meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebesar 75% dari tambahan 100 GW pembangkit listrik hingga 2040. "Kalimantan memiliki potensi EBT yang kaya, seperti biogas, biomassa, tenaga surya, dan angin, yang dapat dimanfaatkan secara optimal," paparnya.

Selain itu, PLN juga aktif mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai melalui pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). "Saat ini, PLN telah menyediakan 75 SPKLU di Kalselteng, dengan rata-rata jarak antar SPKLU sekitar 42 km, yang semakin memudahkan pengguna kendaraan listrik dalam melakukan perjalanan jarak jauh," tambahnya. (muz/gr/oz)



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

Wartono Ingin Fokus PSU

Wakil Wali Kota Banjarbaru Mengundurkan Diri

BANJARBARU, BPOST Dalam waktu dua pekan, Ibu Kota Kalimantan Selatan (Kalsel), Banjarbaru kehilangan dua pejabat utamanya. Terbaru, Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono menyatakan mundur dari jabatannya, Kamis (13/3). Wartono menyampaikan pengunduran diri da-

lam rapat paripurna DPRD Banjarbaru, dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjarbaru Akhir Tahun Anggaran 2024 serta pengumuman usulan pemberhentian Wali Kota Banjarbaru Masa Jabatan 2021-2026.

Sebelum Wartono, Wali

Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin telah terlebih dahulu menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Banjarbaru pada Kamis (6/3).

"Menyatakan mengundurkan diri juga dari jabatan saya sebagai Wakil Wali Kota

● Hal 5 kol 4-7

Dampak Psikologis ke Kotak Kosong

PENGUNDURAN diri Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, dari jabatannya jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru 2025 menuai beragam analisis dari para pengamat politik.

Langkah tersebut dinilai membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik di Banjarbaru, terutama terkait pencalonan Lisa Halaby dan keberadaan kotak kosong.

Pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Bachruddin Ali Akhmad menilai, pengunduran diri

● Hal 5 kol 4-7



KOMINFO

Wartono Ingin...

● Sambungan Hal 1

Banjarbaru," kata Wartono di hadapan peserta rapat paripurna.

Keputusan ini menjadi kejutan bagi peserta paripurna. "Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan menjelang Pemungutan Suara ulang (PSU), maka dengan ini saya Wartono sebagai Wakil Wali Kota Banjarbaru periode 2021-2026 menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Wali Kota Banjarbaru terhitung sejak 14 Maret 2025," ucapnya.

Usai penyampaian pengunduran diri, Wartono meninggalkan ruang rapat paripurna.

Tak berselang lama, Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra menanyakan terkait persetujuan seluruh anggota DPRD terkait pengunduran diri Wartono dan seluruh le-

gislator menyatakan setuju. "Setuju," ucap seluruh anggota DPRD Banjarbaru.

Ditemui usai paripurna, Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra mengaku pengunduran diri Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono juga baru diketahui dirinya pada saat itu. "Ini termasuk salah satu kejutan lagi. Karena hari ini paripurna mengenai pengumuman pengusulan pemberhentian Wali Kota, jadi masih bisa dimungkinkan pengunduran diri Wakil Wali Kota," ucapnya.

Selanjutnya, ujar Rizky, untuk mengisi kekosongan jabatan pemimpin daerah, pihaknya akan segera rapat koordinasi bersama pemerintah kota dan provinsi. "Semoga dalam waktu dekat kita sudah ada penunjuk-an," imbuhnya.

Berstatus sebagai kader PDI Perjuangan, pengunduran diri Wartono juga sudah dikomunikasikan sebelumnya ke partai. Hal itu diung-

kap Sekretaris DPC PDI Perjuangan Banjarbaru, Windi Novianto.

Dikatakannya Wartono mengundurkan diri guna menghindari konflik kepentingan saat pelaksanaan PSU Banjarbaru pada 19 April mendatang. PSU diikuti pasangan Erna Lisa Halaby-Wartono, melawan kotak kosong.

"Maka pak Wartono mundur dari jabatan Wakil Wali Kota, jadi bisa lebih fokus PSU," kata Wakil Ketua II DPRD Banjarbaru ini.

Adapun keputusan yang disampaikan Wartono, ujar Windi sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga maupun pasangan politik Wartono. "Pengunduran diri Wartono, sebagai bentuk antistipasi menghindari gugatan di kemudian hari," jelasnya.

Mengenai tawar kekuasaan di Banjarbaru, terpisah Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tupem) Setdako Banjarbaru, Indra Put-

ra menjelaskan mekanisme pengangkatan pejabat Wali Kota Banjarbaru tetap sama. "Gubernur akan mengusulkan calon penggantinya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," katanya.

Setelah pengusulan dilakukan, Kemendagri akan meninjau dan memberikan persetujuan sebelum menetapkan pejabat Wali Kota yang baru.

Lantas, berapa lama posisi pejabat (PJ) Wali Kota Banjarbaru harus terisi?

Indra mengatakan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, posisi PJ Wali Kota harus segera diisi tanpa penundaan yang tidak perlu.

"Umumnya pengisian jabatan tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 15 hari setelah terjadi kekosongan. Sebagaimana diatur dalam peraturan terkait pemerintahan daerah dan pengangkatan pejabat sementara," pungkasnya. (nan)



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

Kebijakan Harus Konsisten

RENCANA pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi berbagai persoalan ekonomi pedesaan.

Namun, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa koperasi merah putih dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dibandingkan BUMDes dan Bumdesma, pandangan Syahril, Koperasi Merah Putih dapat menjadi alternatif yang lebih baik jika dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.

"Jadi, perlu diingat bahwa BUMDes dan Bumdesma sudah ada dan diatur undang-undang desa, sehingga perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa Koperasi Merah Putih tidak akan membebani desa," tukasnya.

Adapun keberatan sejumlah kepala desa di Purworejo dapat dipahami karena Koperasi Merah Putih masih belum matang dan berpotensi membebani desa.

Begitu pula, mengenai modal awal Rp3-5 miliar yang dijanjikan pemerintah dapat menjadi beban untuk koperasi dan pemerintah sendiri jika tidak dijalankan dengan efektif dan efisien.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa koperasi ini dapat berjalan efektif dan efisien. "Ada keluhan tiap ganti presiden, ganti kebijakan. Dulu SBY ada PNPM, lalu Dana Desa di zaman Jokowi, dan sekarang Prabowo dengan Koperasi Merah Putih.

Sarannya, untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa koperasi merah putih dapat berjalan efektif dan efisien. (dea)



ISTIMEWA

**DR IR SYAHRIL
SHADDIQ M
ENG MM**

Dosen Fakultas
Ekonomi Bisnis ULM



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

BANJARMASIN POST



Senin
17 Maret 2025

ULM Tuan Rumah Pencanangan Asta Kampus dan Sekolah

● Menteri LH Libatkan Lingkungan Pendidikan Kelola Sampah

BANJARBARU, BPOST - Kementerian Lingkungan Hidup resmi membuka kampanye kegiatan Asta Kampus dan Sekolah Dalam Aksi Peduli Sampah Nasional bertempat di Auditorium Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, Sabtu (15/3).

Pantauan BPost, kegiatan ini dibuka langsung Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq dan dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendik-tisaintek) RI, Prof. Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah RI, Prof. Atip Latipulhayat, Plh Sekda Provinsi Kalsel, M Syarifuddin, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan SH SIK MH dan Rektor ULM, Prof Ahmad Alim Bachri SE MSI.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, sinergi tiga kementerian ini menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan pengelolaan sampah di lingkungan pendidikan.

"Kita sepakat melibatkan universitas dan sekolah dari berbagai wilayah di Indonesia dalam gerakan nyata mengurangi dampak buruk sampah terhadap lingkungan," ujarnya.

Hanif mengatakan program ini juga sebagai bagian utama dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025, yakni mengampanyekan program Asta Kampus dan Sekolah yang diikuti oleh 2.137 peserta yang dilaksanakan di delapan universitas di Indonesia, yaitu ULM selaku tuan rumah pencanangan, Universitas Syiah Kuala, Universitas Hasanuddin, Universitas



Cenderawasih, Universitas Brawijaya, Universitas Patimura, Universitas Udayana, dan Universitas Nusa Cendana, Kupang.

"Selain itu, sebanyak 56 sekolah tingkat dasar dan menengah turut serta dalam gerakan ini, menandai komitmen nasional terhadap keberlanjutan lingkungan sejak usia dini," bebernya.

Hanif menegaskan HPSN menjadi momen refleksi terhadap sistem pengelolaan sampah di Indonesia.

"Saat ini, Indonesia menghasilkan 56,63 juta ton sampah per tahun, di mana 60,99 persen di antaranya masih belum terkelola dengan baik," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa dari segi komposisi, sampah sisa makanan mendominasi dengan 39,87 persen, diikuti oleh sampah plastik 19,16 persen, kayu/ranting 11,83 persen, serta kertas/karton 10,83 persen.

"Mayoritas sampah ini berasal dari rumah tangga 50,78 persen, pasar 12,19 persen, kawasan permukiman 14,77 persen dan kawasan lainnya 8,14 persen," ungkapnya.

Hanif menyebut sampah plastik dan sisa makanan menjadi penyumbang terbesar, sehingga diperlukan



BANJARMASIN POST/STANILIAUS SENE

PEMBUKAAN - Acara pembukaan Program Asta Kampus dan Sekolah oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, di ULM Banjarbaru, Sabtu (14/3).

peningkatan penerapan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) untuk mengatasi permasalahan ini secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dijelaskan dia, sampah sejatinya akan selalu dihasilkan dalam proses kegiatan manusia.

"Untuk itu, sampah yang dihasilkan merupakan tanggung jawab bersama dan sudah seharusnya mulai mengurangi dan mengelola agar tidak terbuang ke tempat pemrosesan akhir," lanjutnya.

Hanif pun mengapresiasi hadirnya dua mitra kementerian strategis, yaitu Kemendiknasaintek dan Kemendikdasmen.

Dia menyakini dengan

kolaborasi yang efektif dan sinergis dapat menyelesaikan masalah pengelolaan sampah.

"Ini bentuk kolaborasi nyata mewujudkan lingkungan pendidikan bersih dari sampah dan membangun perilaku sadar sampah sejak dini," tegas mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan ini.

Sementara itu, Rektor ULM, Prof. Ahmad Alim Bachri selaku tuan rumah mengakui bangga dipercaya kementerian dan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan dan mencerdaskan masyarakat tentang pengelolaan sampah. (nan/*)



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting

MERDEKA
BELAJAR

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

RADAR BANJARMASIN

Senin
17 Maret 2020





Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

RADAR BANJARMASIN

Senin
17 Maret 2020

**KUNJUNGAN
KERJA:**
Menteri
Lingkungan
Hidup, Hanif
Faisol Nurrafiq
ditemani
Wall Kota
Banjarmasin,
Muhammad
Yamin, dalam
kunjungan
kerja ke
Banjarmasin,
Sabtu (15/3).



Kesempatan Kedua dengan Tapi

Tempat Pemrosesan Akhir
Sampah (TPAS) Basirih mungkin
akan dibuka lagi. Tapi, ada
tapinya....

BANJARMASIN-
Kesempatan kedua
terbuka setelah
Menteri Lingkungan
Hidup, Hanif Faisol
Nurrafiq berencana
mengevaluasi
penutupan TPA
di Jalan Gubernur
Subarjo itu. ■

► Baca Kesempatan...
Hal 14

Selain Banjarmasin,
ada 343 TPA di seluruh
Indonesia yang diawasi.
Presiden Prabowo
Subianto ingin masalah
sampah ini benar-benar
diselesaikan."

HANIF FAISOL NURRAFIQ
Menteri Lingkungan Hidup



**DI TENGAH
HUJAN:** Menteri
Lingkungan
Hidup,
Hanif Faisol
Nurrafiq saat
mengunjungi
Pasar Pandu
di Banjarmasin
Timur.

Pasar Harus Kelola Sampahnya Sendiri

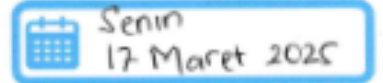
Baca Halaman 1



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

RADAR BANJARMASIN



Pemko Jangan Lega Dulu

KESEMPATAN...
Sambungan Hal 9

"Kami akan mengevaluasi penyevelan TPAS Basirih. Saat pendalaman awal, data-data yang kami terima ternyata tidak lengkap," ujar Hanif dalam kunjungan kerja ke Banjarmasin, Sabtu (15/3).

Ia mengaku baru mengetahui data yang menunjukkan bahwa TPAS di Banjarmasin Selatan itu dibangun pada tahun 1997 oleh World Bank.

Dengan standar internasional yang dimiliki Bank Dunia, seharusnya konstruksi TPAS sudah memenuhi prinsip pengelolaan lingkungan, termasuk landasan yang kedap untuk mencegah pencemaran.

Namun, kata Hanif, pengelolaan yang tidak sesuai standar selama bertahun-tahun membuat TPAS Basirih menjadi bermasalah.

"Kenapa sekarang terlihat begitu parah? Karena sampah dan air limbah sudah melampaui tanggul. Pengelolaannya sembrono, hingga sampah jatuh ke tempat yang tidak seharusnya," jelas mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan itu.

Kesalahan di masa lalu ini, menurut Hanif, menjadi tantangan besar bagi Wali Kota Banjarmasin yang baru, Muhammad Yamin. Untuk itu, evaluasi menyeluruh akan dilakukan, termasuk kemungkinan pemanfaatan lahan yang masih layak.

"Jika masih ada lahan yang memenuhi syarat, tentu bisa dipertimbangkan untuk digunakan kembali. Namun, penggunaannya akan sangat terbatas," tegas Hanif.

TPAS Basirih tidak akan lagi menjadi tempat pembuangan dan penumpukan sampah sembarangan.

"Sampah yang masuk harus dipilah terlebih dahulu. Hanya residu yang boleh masuk di zona layak, dengan pengelolaan sesuai standar, seperti pemilahan dan pengolahan. Segala prosesnya akan diawasi tim kami dan Kementerian PUPR," tambahnya.

Prinsipnya adalah

menghentikan praktik open dumping dan menutup zona-zona yang sudah tidak layak.

KLH akan memberikan arahan teknis untuk membantu pengelolaan TPAS Basirih di masa mendatang. Namun, ia mengingatkan Pemko Banjarmasin agar tidak terlalu cepat merasa lega.

"Jika hasil kajian menunjukkan kerusakan lingkungan yang parah dan tidak memenuhi syarat, TPAS ini bisa kami tutup sepenuhnya," tegasnya.

KLH akan menyiapkan dua surat keputusan (SK) sebagai pedoman bagi pemko. Pertama surat penghentian praktik open dumping. Surat kedua adalah arahan tata kelola sampah untuk memastikan pengelolaan sampah memenuhi standar yang ditetapkan.

Kedua surat ini memiliki konsekuensi hukum dan akan dipantau pelaksanaannya.

"Selain Banjarmasin, ada 343 TPA di seluruh Indonesia yang akan diawasi. Presiden Prabowo Subianto ingin masalah sampah ini benar-benar diselesaikan," ujar Hanif.

Hanif juga mengungkap berbagai langkah sedang disusun, termasuk penerapan teknologi, tata kelola yang baik, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat.

Kolaborasi Banjarmasin-Batola

Selain menimbang operasional kembali TPAS Basirih, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurrafiq menyarankan kolaborasi antara Pemko Banjarmasin dan Pemkab Barito Kuala.

"Koordinasi antara dua pimpinan muda, Pak Yamin dan Pak Bahrul Ilmi juga bisa menjadi solusi. Kolaborasi ini penting untuk menyelesaikan persoalan sampah di kedua daerah," ujar Hanif yang ditemani Bupati Batola, Bahrul Ilmi dalam kunjungan kerja tersebut.

Produksi sampah di Banjarmasin yang mencapai 600 ton atau estimasi 0,85 kilogram per orang per hari menjadi tantangan besar.

Maka pengelolaan sampah

harus dirancang dengan strategi yang efisien dan berbiaya murah, mengingat keterbatasan anggaran daerah.

"Masalah ini memang mahal. Karena itu, pengurangan sampah dari sumbernya adalah langkah penting," pungkasnya.

Kawasan Strategis

"Diskusi dengan masyarakat juga sangat dibutuhkan agar mereka memahami bahwa sampah yang dihasilkan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah," kata Hanif.

Masyarakat pun diminta lebih aktif dalam memilah sampah dan memanfaatkan teknik pengolahan sederhana seperti pengomposan.

Selain itu, kawasan-kawasan strategis seperti kampus, pasar, hotel, restoran, dan perumahan diwajibkan untuk menangani sampahnya sendiri.

"Jika kawasan-kawasan ini mampu mengelola sampahnya, sekitar 15% masalah sampah di Banjarmasin bisa terselesaikan," tambah Menteri LH.

Tanggung Jawab Industri

Tak hanya masyarakat, produsen kemasan plastik atau sachet juga harus bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan.

"Produsen harus bertanggung jawab atas limbah yang mereka timbunkan, misalnya dengan menjadi pembeli material daur ulang seperti karton dan plastik," tegasnya.

Hanif juga meminta keterlibatan industri besar di Kalimantan Selatan, seperti PLTU, Semen Tonasa, dan Semen Indonesia, untuk menyerap sampah sebagai bahan bakar alternatif atau Refuse Derived Fuel (RDF).

Sesuai peraturan Kementerian ESDM, industri wajib membeli RDF dengan harga 120% dari harga batu bara, termasuk biaya pengangkutan.

"Semua pihak harus bergerak bersama. Dengan regulasi, edukasi, dan kolaborasi yang kuat, saya optimistis masalah sampah ini dapat diselesaikan secara bertahap," pungkas Hanif.

Ada Lahan di Banjarba

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyaml posifit rencana evaluasi ai TPAS Basirih.

Sejak TPAS itu ditutup pa 1 Februari 2025, Banjarba: menghadapi krisis sampah.

"Alhamdulillah, ini solusi ya sangat baik. Semoga bisa sege kalau bisa dalam satu atau d hari kedepan. Mudah-mudah TPAS Basirih dapat kemb beroperasi, tentu deng memenuhi semua syarat KL, ujar Yamin.

Politikus Partai Gerindra menjamin TPAS Basirih tid lagi akan digunakan sebag tempat penumpukan sampal

Zona-zona yang tidak lay akan ditutup, sementara lah yang belum dimanfaatkan ak dioptimalkan untuk menduku pemilahan.

"Ke depan, di TPAS Basi akan kami buat fasilit penampungan sampah ya dinaungi tenda. Agar samp tidak terpapar hujan atau par secara langsung," jelasnya.

Selain itu, Yamin ju berkomitmen untu segera menyusun regu pengelolaan sampah mand di perkantoran, restoran, pas kampus, dan kawasan strateg lainnya.

"Kami masih mengkaji apak nanti akan dibuat dalam bent peraturan daerah (Perda) at cukup dengan peraturan w kota (Perwali)," imbuh mant Wakil Ketua DPRD Banjarbae itu.

Terkait tawaran ker sama dengan Pemkab Bate untuk menyediakan lah: pemilahan sampah, Yam mengaku masih menimba opsi tersebut.

"Masih dipikirkan, menging kami juga memiliki lahan hektare di Banjarbaru. Jadi ma yang akan digunakan, nanti ak diputuskan."

Yamin berjanji akan mengk semua saran yang masi dengan matang. "Karena kau tidak ingin pengelolaan samp yang salah malah berujung pa masalah hukum, baik bagi kep dinas maupun kepala daera tutup Yamin. (daf/az/fud)



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

BANJARMASIN POST



Selasa
18 Maret 2025



BANJARMASIN POST/MUHAMMAD RAJAPULIRI

PERESMIAN RUMAH AMAL - Rektor ULM, Prof Ahmad saat memberikan sambutan dalam peresmian Rumah Amal ULM di Masjid Baitul Hikmah, Kampus ULM, Banjarmasin, Senin (17/3).

Siap Bantu 4.000 Mahasiswa Kurang Mampu

● ULM Resmikan Rumah Amal

BANJARMASIN, BPOST - Sebanyak 4.000 mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang mengalami kesulitan ekonomi kini memiliki harapan baru.

ULM meresmikan Rumah Amal ULM pada Senin (17/3), bertepatan dengan peringatan Nuzulul Qur'an 17 Ramadan.

Rumah amal ini akan menjadi wadah penyaluran zakat dan infak dari civitas akademik, dengan prioritas utama membantu mahasiswa kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan mereka.

Acara peresmian berlangsung di Masjid Baitul Hikmah, Kampus ULM, Banjarmasin, dan dihadiri dengan suasana kebersamaan dalam kegiatan buka puasa bersama.

Rektor ULM, Prof Ahmad, menegaskan kehadiran Rumah Amal ULM diharapkan menjadi solusi bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi.

"Dari data yang kami miliki, ada sekitar 4.000 mahasiswa yang membutuhkan bantuan. Rumah Amal ULM ini hadir untuk membantu mereka agar tetap bisa fokus menyelesaikan pendidikan tanpa harus terbebani masalah finansial," ujarnya.

Lebih dari sekadar bantuan keuangan, Rumah Amal ULM juga mengusung prinsip inklusivitas.



Rektor Ahmad menegaskan, layanan rumah amal ini tidak membedakan suku, agama, atau latar belakang lainnya.

Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Baznas akan memberikan edukasi, arahan, serta pembinaan agar pengelolaan zakat di Rumah Amal ULM berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami menyambut baik kehadiran Rumah Amal ULM. Kami berharap

rumah amal ini bisa terus berkembang dan senantiasa melaporkan perkembangannya kepada Baznas," ujar Wakil Ketua 3 Baznas Kalsel, Ahmad Ruffie.

Dengan adanya Rumah Amal ULM, diharapkan mahasiswa ULM yang mengalami kesulitan ekonomi tidak lagi harus mengorbankan pendidikan.

Rumah amal ini bukan sekadar tempat penyaluran zakat, tetapi juga wujud kepedulian ULM dalam memastikan setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. (mar/*)

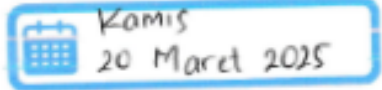


Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- **Berita Lainnya**
- Opini Dosen/Mahasiswa

BANJARMASIN POST



31 Kuota Fakultas Perikanan Tak Terisi

● 1.896 Peserta SNBP Tembus ULM

BANJARMASIN, BPOST - Balinah Ismatul Hawa, siswi MAN 2 Banjarmasin mengaku senang dan hampir menjatuhkan gadget yang dipegang karena terkejut ketika mengetahui dirinya dinyatakan lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Dari 700-an pendaftar dengan kuota yang diterima hanya 90, penghafal Al-Qur'an sebanyak 6 Juz ini salah satu yang berhasil lulus SNBP di Universitas Air-

langga Surabaya.

Balinah sendiri mengam-bil jurusan Kesehatan Masyarakat, ia mengaku tertarik dengan dunia kesehatan sejak duduk di bangku SMP. "Alhamdulillah senang, hp-nya hampir terlempar karena kaget, mama senang sampai betampal ke kawan-an mama," kata Balinah saat ditemui BPost, Rabu (19/3).

Sementara itu, sebanyak 1.896 calon mahasiswa di-

● Hal 11 kol 1-3



DOK.BPOST

PINTU KELUAR - Suasana di depan pintu keluar Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Brigjen Hasan Basry, Banjarmasin.

31 Kuota...

● Sambungan Hal 9

nyatakan lulus dalam Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan.

Jumlah ini berasal dari total 14.786 pendaftar yang bersaing untuk masuk perguruan tinggi tersebut.

Meski demikian, dari daya tampung yang tersedia sebanyak 1.929 kursi, masih terdapat 33 kuota yang belum terisi.

"Sisa kuota akan dipindahkan ke jalur SNBT," ujar Wakil Rektor Bidang Akademik ULM, Iwan Afandie, Rabu (19/3).

Fakultas Perikanan dan Kelautan menjadi fakultas dengan jumlah kursi kosong terbanyak, yakni 31.

Kekosongan itu tersebar di

beberapa program studi, yaitu Akuakultur (4 kursi), Manajemen Sumber Daya Perairan (5), Perikanan Tangkap (3), Sosial Ekonomi Perikanan (12), dan Teknologi Hasil Perikanan (7).

Dua kuota kosong lainnya berasal dari Program Studi Pendidikan Fisika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Iwan menjelaskan, kekosongan tersebut terjadi karena beberapa program studi masih minim peminat.

Sebaliknya, sejumlah program studi justru mengalami kelebihan pendaftar. Program Studi Manajemen, misalnya, mencatat 1.009 pendaftar untuk 50 kuota yang tersedia.

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan juga menjadi favorit, dengan total 2.634 pendaftar untuk 103 kursi

yang tersedia. Hal serupa terjadi di Fakultas Teknik, yang memiliki 2.283 pendaftar dengan kuota hanya 231.

Setelah pengumuman SNBP, ULM kini berstap untuk tahapan seleksi berikutnya, yakni Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Sesuai jadwal, Pendaftaran UTBK-SNBT berlangsung pada 11-27 Maret 2025. Sementara Pelaksanaan UTBK mulai 23 April-3 Mei 2025.

Hasil SNBT akan diumumkan pada 28 Mei 2025. Sedangkan Masa Unduh Sertifikat UTBK dimulai pada 3 Juni-31 Juli 2025.

Calon peserta diminta untuk memperhatikan jadwal tersebut dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. (msr/sal)

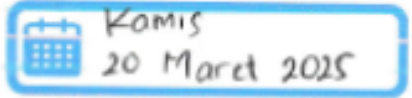


Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

BANJARMASIN POST



Ketagihan...

● Sambungan Hal 9

pus ULM di Banjarmasin.

"Kalau weekend pasti main sepatu roda. Minimal satu kali dalam setiap pekannya," ujarnya.

Bermain sepatu roda ini dije-

laskan oleh Nida biasanya dilakukannya pada pagi hari dan bisa juga dilakukan pada sore hari.

"Biasanya kalau main sepatu roda bisa satu sampai dua jam," katanya.

Dibeberkan juga oleh Nida bahwa hobi bermain sepatu roda ini sendiri merupakan hobi yang paling digemarinya

sejak masih duduk di SD.

"Awalnya melihat kakak suka bermain sepatu roda, kemudian saya belajar dan ketagihan. Kemudian sempat beberapa tahun tidak main, dan saat SMK sampai sekarang main sepatu roda lagi," katanya.

Nida juga membeberkan dirinya pun sangat senang

dengan hobinya yang satu ini, karena menurutnya sangatlah menantang.

"Ada tantangan-tantangannya dan itu keren. Tidak semua orang bernyali bermain sepatu roda. Bahkan ada yang bermain sepatu roda baru jatuh sekali sudah jera," pungkasnya. (ran)



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

BANJARMASIN POST

Jumat
21 Maret 2025

Jangan Ganggu Lingkungan

RENCANA Pemko Banjarbaru yang menghibahkan lahan untuk pembangunan Stadion berstandar FIFA di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru harus disambut baik.

Pembangunan stadion ini merupakan proyek ambisius yang sudah tentu menjanjikan banyak manfaat. Apalagi, dengan mengacu standar FIFA, stadion ini dapat digunakan untuk perhelatan nasional.

Banyak hal yang harus diperhatikan, bukan hanya ketersediaan lahan tapi juga pembiayaan pembangunan hingga tata kelolanya.

Kerja sama antara Pemko Banjarbaru dan Pemprov Kalsel ini harus didasarkan pada kerangka kerja yang jelas dengan menjamin pembagian tanggung jawab dan manfaat secara adil dan efektif.

Perjanjian formal perlu mencakup semua aspek legal, operasional, dan pemeliharaan stadion, serta resolusi konflik.

Harus diingat, pembangunan stadion Banjarbaru tidak mengganggu nilai ekologis lingkungan, terlebih rencana tapak stadion terletak di Taman Kehati di Kecamatan Cempaka.

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) harus dilakukan secara detail, mengusulkan solusi inovatif untuk integra-



**DR ENG AKBAR
RAHMAN**
Akademisi dan Ahli Tata Kota ULM

si desain hijau yang dapat mencakup bangunan ramah lingkungan.

Sistem manajemen air hujan dan penggunaan material berkelanjutan hingga sistem pengelolaan air limbah harus jelas pengelolaannya.

Gagasan ini akan memberikan jaminan perlindungan lingkungan lokal dan meningkatkan citra stadion sebagai model keberlanjutan, maka sangat penting memegang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penting adanya transparansi dalam pengelolaan proyek dan partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam pengambilan keputusan adalah vital untuk kesuksesan jangka panjang stadion.

Keterbukaan ini akan memperkuat dukungan publik dan memastikan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab.

Pendekatan inklusif juga membantu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang ekonomi daerah yang dapat ditimbulkan oleh kehadiran stadion, seperti pariwisata olahraga dan peningkatan bisnis lokal.

Pembangunan stadion Banjarbaru adalah kesempatan untuk memperkuat infrastruktur olahraga di Kalsel dengan perencanaan yang cermat dan eksekusi yang efisien.

Proyek ini akan menyediakan venue berkualitas tinggi untuk pertandingan dan event internasional.

Diharapkan saat stadion ini berdiri menjadi pusat kegiatan sosial dan magnet ekonomi, serta simbol dari prinsip pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan di Kalsel. (nan)



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

BANJARMASIN POST



Selasa
25 Maret 2025

Pelayanan Tak Boleh Turun

ADANYA kebijakan work from anywhere (WFA) atau flexible work arrangement (FWA) tentunya akan berpengaruh terhadap intensitas arus lalu lintas, terutama di jam-jam tertentu misalnya pagi saat

● Hal 5 kol 4-7



ISTIMERA

**ARIF RAHMAN
HAKIM**

Pengamat
Pemerintahan dari ULM

Pelayanan Tak Boleh...

● Sambungan Hal 1

pergi ke kantor atau sore saat pulang dari kantor. Hal ini akan mengurangi kepadatan arus lalu lintas.

Namun apakah bekerja di mana saja untuk aparatur sipil negara (ASN) juga akan efektif untuk mengatasi kepadatan arus mudik, bisa dilihat lagi karena tidak semua menerapkan kebijakan ini.

Misalnya suami menerapkan hal ini, namun di tempat kerja istrinya tidak diterapkan maka jadwal mudik bisa tetap sesuai dengan jadwal cuti bersama.

Dan kebijakan ini tidak bisa diterapkan kepada pelayanan publik khususnya yang harus dilakukan secara bertatap muka. Hanya bisa diterapkan untuk pekerjaan yang bisa dikerjakan dari luar kantor, dan kegiatan rapat bisa dilakukan secara zoom meeting. Namun harus tetap memperhatikan standar minimum pelayanan

dan harus dengan komitmen memprioritaskan keperluan masyarakat.

Kualitas pelayanan untuk masyarakat pun harusnya tidak menurun saat penerapan kebijakan ini, sehingga pengawasan juga sangat penting terkait apa saja yang dikerjakan dan sebagainya.

Pemerintah pun harus melakukan sosialisasi dan informasi yang jelas, apabila terjadi perubahan mekanisme dan sistem. Kemudian menyediakan layanan aduan kepada masyarakat. (ran)



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa
- Kepakaran dan Riset Dosen
- **Berita Lainnya**
- Opini Dosen/Mahasiswa

12

SELASA, 25 MARET 2025

www.baritopost.co.id

BARITO POS

website: www.baritopost.co.id

e-mail: baritopost@yahoo.com

e-mail iklan: iklan_baritopost@yahoo.com

telepon: (0811) 5153446

ULM Jaring 1.896 Calon Mahasiswa Jalur Prestasi Akademik

Banjarmasin, BARITO
Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Kalimantan Selatan menjangkit sebanyak 1.896 calon mahasiswa yang lolos seleksi pada jalur prestasi akademik yakni Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) pada tahun 2025.

"Daya tampung SNBP sebanyak 1.929 kursi, jadi tersisa 98,3 persen dari kuota yang tersedia," kata Wakil Rektor Bidang Akademik ULM Iwan Affan di Banjarmasin, Senin.

SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan non akademik siswa.

Tahun ini siswa peminat memilih ULM 14.786 pendaftar bersaing pada 69

program studi sarjana (S1) yang disediakan termasuk Prodi Antropologi yang baru dibuka.

Iwan menyebut adanya sisa kuota tak terpenuhi itu lantaran beberapa program studi masih minim peminat.

Sebaliknya, sejumlah program studi justru mengalami kelebihan pendaftar seperti Program Studi Manajemen mencatat 1.009 pendaftar untuk 50 kuota yang tersedia.

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan juga menjadi

favorit dengan total 2.634 pendaftar untuk 103 kursi yang tersedia.

Hal serupa terjadi di Fakultas Teknik yang memiliki 2.283 pendaftar dengan kuota hanya 231.

Bagi yang tidak lolos jalur prestasi, ULM masih membuka kesempatan calon mahasiswa baru di jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Pendaftaran SNBT pada 11 sampai 27 Maret 2025, sementara pelaksanaan ujian tertulisnya mulai 23 April hingga 3 Mei 2025.

Tahun ini ULM menyediakan kuota calon mahasiswa baru sekitar 6.500 orang dari tiga jalur seleksi, yakni SNBP, SNBT dan jalur seleksi mandiri. ant



Kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin. (foto ant/bri)



Rubrik

- Kegiatan Pimpinan
- Prestasi Mahasiswa

- Kepakaran dan Riset Dosen
- Berita Lainnya
- Opini Dosen/Mahasiswa

BANJARMASIN POST



Rabu
26 Maret 2025

Nasrullah Sarankan Layanan Mudik Gratis via Sungai

BANJARMASIN, BPOST - Lonjakan penumpang transportasi air di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjelang Idulfitri semakin terlihat, terutama di jalur Sungai Barito yang menghubungkan Banjarmasin dan Muarateweh.

Meski kapal masih menjadi pilihan utama bagi banyak perantau, fasilitas mudik

gratis yang disediakan pemerintah sejauh ini lebih banyak berfokus pada jalur darat.

Menanggapi fenomena ini, Dosen Antropologi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Nasrullah, menilai pemerintah

• Hal 11 kol 1-3

Nasrullah...

• Sambungan Hal 9

daerah di sepanjang jalur Sungai Barito perlu mulai mempertimbangkan program mudik gratis menggunakan kapal.

"Saya mengusulkan semestinya Pemkab di jalur Sungai Barito, terutama di Barito Selatan, Barito Utara, atau Murung Raya, mengadakan mudik gratis melalui jalur sungai. Jika dilakukan, waktu tempuh Pancar Mas II yang biasanya 48 jam bisa lebih pendek karena hanya menyinggahi tempat tertentu saja," ujar Nasrullah, Selasa (25/3).

Menurutnya, selama ini program mudik gratis yang diadakan pemerintah kabupaten atau provinsi cenderung berfokus pada jalur darat. Bus dan moda transportasi lainnya lebih ditekankan dalam program-program tersebut.

Adalah, jalur sungai menjadi sarana mo-

bilitas utama bagi banyak masyarakat pedalaman Kalimantan, terutama mereka yang tinggal di daerah yang belum memiliki akses jalan darat yang baik.

Menurut Nasrullah, penggunaan kapal untuk mudik bukan hanya sekadar alternatif, tetapi bisa menjadi solusi utama bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada jalur air.

"Daya tampung kapal lebih besar, sehingga bisa mengakomodasi lebih banyak penumpang. Selain itu, perjalanan sungai juga bisa meningkatkan kebersamaan warga selama perjalanan," tambahnya.

Selain itu, dengan meningkatnya jumlah perantau yang mudik melalui jalur sungai setiap tahunnya, penyelenggaraan mudik gratis bisa menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan transportasi publik.

Nasrullah menilai, mudik gratis via jalur sungai memi-

liki beberapa keuntungan, di antaranya daya tampung yang lebih besar, biaya operasional yang lebih efisien, serta pengalaman perjalanan yang lebih santai bagi penumpang.

Di sisi lain, ada tantangan yang perlu diperhatikan, seperti kesiapan infrastruktur dermaga, ketersediaan kapal, serta pengelolaan jadwal keberangkatan agar program ini berjalan efektif.

Saat ini, transportasi air di jalur Banjarmasin-Muarateweh masih bergantung pada kapal seperti Pancar Mas II, yang telah beroperasi selama sekitar 20 tahun.

Kapal ini berangkat setiap Senin dari Dermaga Banjar Raya, Banjarmasin, dan memerlukan waktu sekitar dua hari dua malam untuk mencapai Muarateweh. Dengan program mudik gratis yang terorganisir dengan baik, perjalanan ini bisa dipersingkat dan lebih efisien bagi para pemudik. (msr)